



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

PT. BPR NGUNUT ARTA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.11.378.326, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.6.470.989. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR "NGUNUT ARTA" selanjutnya.



2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada PT. BPR Ngunut Arta bertujuan Meningkatkan kinerja Bank , melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan ketentuan eksternal bank, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang
- Memperbaiki budaya kerja yang dimiliki bank
- Mengelola Sumber Daya bank secara baik dan profesional
- Mendorong dan mendukung pengembangan Bank

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Ngunut Arta sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

- Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan
- Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi di perlukan agar bank menjalankan usahanya secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

2 Accountability

- Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif . Bank sebagai lembaga kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan



pemegang saham, nasabah, pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan

- Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas bank harus memperhatikan aspek-aspek kejelasan tugas dan tanggungjawab masing masing fungsi dan unit organisasi bank sesuai dengan tujuan bank.

3 Responsibility

- Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Responsibility di perlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang
- Dalam menjalankan responsibility semua organ dalam bank harus mampu menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan dalam menjalankan tanggungjawab sosial, hal ini untuk memberikan image positif terhadap bank

4 Independency

- Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, maka bank harus senantiasa di kelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektifitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
- Menghindari dominasi dari manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif

5 Fairness

- Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan



asas kewajaran dan kesetaraan dari masing masing pihak yang bersangkutan

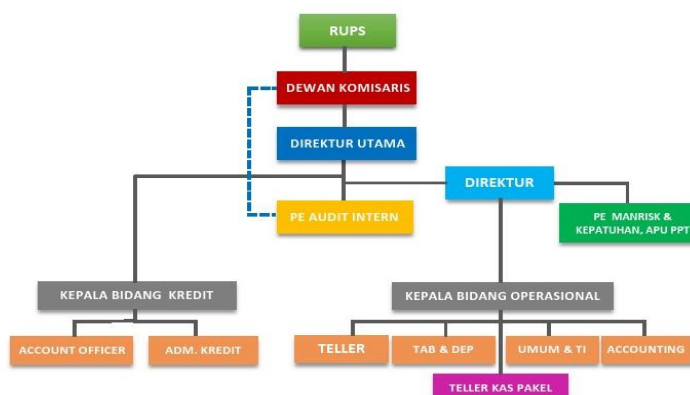
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PT. BPR Ngunut Arta telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Ngunut Arta menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Ngunut Arta
2. PT. BPR Ngunut Arta berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ngunut Arta dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing yang tinggi.
3. PT. BPR Ngunut Arta juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Ngunut Arta sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NGUNUT ARTA





III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 461 tanggal 25 Januari 2018 pada Notaris Sri Areni, SH, MM adalah sebagai berikut :



Nama	: ANING SUNINGKAT, SE
Jabatan	: DIREKTUR UTAMA
Tempat/Tanggal Lahir	: Tulungagung/24-11-1964
Pendidikan Terakhir	: Sarjana
Lama Jabatan	: 23 tahun
Sertifikasi Direksi	: 651001210632002016
Masalaku	: 21-11-2021
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direktur Utama PT. BPR Ngunut Arta



Nama	: Dra. KUSTIANI
Jabatan	: DIREKTUR
Tempat/Tanggal Lahir	: Tulungagung/15-2-1967
Pendidikan Terakhir	: Sarjana
Lama Jabatan	: 5 tahun
Sertifikasi Direksi	: 65100121061582013
Masalaku	: 27-4-2023
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direktur PT. BPR Ngunut Arta



Keterangan:

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan berdasarkan surat keputusan Nomor SR-8/KO.0402/2017 tanggal 04 Oktober 2017.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Direktur Utama :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
3. Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan, pendanaan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang baik.
4. Memelihara keharmonisan kerja antar bagian, menciptakan rasa aman dan nyaman di tempat kerja.
5. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
6. Melaksanakan dan memimpin rapat bulanan untuk evaluasi kinerja operasional.
7. Melaksanakan dan memimpin rapat bulanan untuk evaluasi kinerja operasional.
8. Melaksanakan survey ke tempat debitur, melakukan pembinaan kepada debitur jika di perlukan.
9. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik dan Komisaris.
10. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan aset BPR.



B. Direktur :

1. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
2. Membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
3. Membuat rencana kerja tahunan dan lima tahunan dengan persetujuan Direktur Utama dan dibawa dalam RUPS untuk mendapat persetujuan, selanjutnya akan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dan digunakan sebagai pedoman BPR.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi kerja tahunan dengan persetujuan Direktur Utama, dan digunakan sebagai laporan dalam RUPS.
5. Menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana.
6. Diskusi dengan Direktur Utama untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 yang berkepanjangan, maka Direksi mengambil sikap untuk melakukan efisiensi biaya operasional hal ini tercermin dari rasio BOPO pada tahun 2020 adalah sebesar 77%.
2. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas yang tercermin dari NPL pada tahun 2020 adalah 4,30%, walaupun secara Outstanding kredit mengalami penurunan bila di bandingkan dengan tahun 2019, hal ini tidak lepas dari pandemi Covid yang mengglobal.
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem diantaranya , penyempurnaan CBS dalam upaya memudahkan dan mempercepat layanan nasabah dengan data yang akurat.

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Semua anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT. BPR NGUNUT ARTA



NO	NAMA DIREKSI	PROSENTASI KEPEMILIKAN SAHAM	
		PT. BPR NGUNUT ARTA	GROUP USAHA
1	ANING SUNINGKAT, SE	Tidak ada	0 %
2	Dra. KUSTIANI	Tidak ada	0 %

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	ANING SUNINGKAT, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Dra. KUSTIANI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	ANING SUNINGKAT, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Dra. KUSTIANI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR NGUNUT ARTA per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 88 tanggal 25 Januari 2018 pada Notaris Sri Areni, SH., MM. adalah sebagai berikut :



Nama	: HADY BANDONO NITIUTOMO
Jabatan	: Komisaris Utama
Tempat/Tgl Lahir	: Surabaya / 24-03-1954
Pendidikan Terakhir	: Diploma Tiga
Lama Jabatan	: 23 Tahun
Sertifikasi Komisaris	: 65100120601392016
Masa Berlaku	: 02-03-2021
Pengalaman Kerja	: Komisaris Utama PT. BPR NGUNUT ARTA
Terakhir	



Nama	: AHMAD TRI WAHYUDI
Jabatan	: Komisaris
Tempat/Tgl Lahir	: Palembang / 14-04-1966
Pendidikan Terakhir	: Sarjana
Lama Jabatan	: 4 Tahun
Sertifikasi Komisaris	: 65100120619552016
Masa Berlaku	: 08-11-2021
Pengalaman Kerja	: Komisaris PT. BPR NGUNUT ARTA
Terakhir	

Keterangan:

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki sertifikasi Dekom.



2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, & mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yg mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
2. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana system.
3. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.
4. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
5. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.



4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	PROSENTASI KEPEMILIKAN SAHAM DEKOM	
		PT. BPR NGUNUT ARTA	GROUP USAHA
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	15 %	0 %
2	AHMAD TRI WAHYUDI	Tidak ada	0 %

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR posisi 31-12-2020 sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	AHMAD TRI WAHYUDI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hub keluarga
2	AHMAD TRI WAHYUDI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-12-2020, dapat di informasikan bahwa modal inti PT. BPR Ngunut Arta adalah sebesar Rp.6.470.989 ribu sehingga masih belum wajib membentuk komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 25 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	408.000
2	Tunjangan	2	107.686
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Mobil Dinas
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1	2	515.686
	(satu) tahun		

**2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	246.000
2	Tunjangan	2	39.937
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	285.937

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di PT. BPR Ngunut Arta adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,96	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,72	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,56	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,72	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,34	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta adalah sebagai berikut :

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIR-AN
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	Komisaris Utama	4	4	0	100%%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	Komisaris	4	4	0	100%%

Keterangan:

PT. BPR Ngunut Arta telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris**Triwulan I**

- Berdasarkan posisi Laporan Keuangan Triwulan I Neraca Pebruari 2020 Tingkat Kesehatan Bank adalah SEHAT, hal ini ditunjukkan dengan adanya CAR 113,55%, LDR 87,79%, ROA,5,48%, BOPO 76,90%, CR 35,93%, PPAPWD 100% dan NPL Netto 2,38%
- Kredit mengalami penurunan sebesar Rp 861.954 ribu di bandingkan dengan triwulan IV 2019 dari 10.962,399 ribu menjadi Rp.10.100.445 ribu dan total kredit NPL juga mengalami penuruanan dari Rp.404.103 ribu menjadi Rp.293.381 ribu
- Perbandingan antara Target RBB dan realisasi pada Triwulan I bahwa, kredit tercapai 93,13%, Tabungan 111,71%, Deposito 107.90%, Laba 94,67% dan Aset 100,36%
- Modal Inti Bank pada triwulan I terpenuhi sebesar Rp 6.221.469 ribu yang terdiri atas :
Modal Disetor Rp 1.000.000, Cadangan Umum Rp.200.000,
Laba tahun lalu Rp 4.956.320, Laba tahun berjalan (50%) Rp.66.149



Saran untuk Manajemen

1. Terhadap kolektibilitas DPK dan KL agar diusahakan penagihan dan pembinaan yang kontinyu, sehingga mengurangi risiko kredit bermasalah
2. Senantiasa menjaga ratio keuangan agar tingkat kesehatan bank tetap pada kategori sehat dan BPR diharapkan dapat terus berkembang secara prudent dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan

Triwulan II

- a. Tingkat Kesehatan Bank pada posisi Triwulan II adalah sehat dengan rincian sebagai berikut:
 - Tidak ada perubahan karena sudah disesuaikan dengan CAR 120,35% meningkat 6,80% karena meningkatnya jumlah Modal
 - LDR 85,86% turun 1,93% di karenakan menurunnya jumlah KYD
 - ROA 4,83% turun 0,65% di karenakan rata rata laba sebelum pajak turun
 - BOPO 86,46% naik 9,56% di karenakan turunnya KYD berakibat pada turunnya pendapatan bank
 - Cash Ratio 30,55% turun 5,38% dikarenakan adanya pengeluaran yang meningkat
 - PPAPWD ketentuan yang berlaku
- b. Perkembangan Kredit
 - Kredit mengalami penurunan Rp 372.004 ribu atau 3,68%, pd triwulan I sebesar Rp 10.100.445 ribu dan pada triwulan ke II menjadi Rp 9.728.441
 - Total Non Performing Loans sebesar Rp 649.000 ribu dengan NP Gross sebesar 6,67% dan NPL Netto adalah 6,05%
 - Dari data di atas agar menjadi perhatian manajemen karena pada saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 , namun penagihan dan pembinaan agar tetap di laksanakan secara rutin dan kontinyu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga di harapkan NPL bisa turun
- c. Perbandingan Rencana Bisnis Bank dengan realisasi posisi triwulan ke IIDibandingkan dengan RBB sampai dengan triwulan II kredit tercapai 85,73%, Tabungan tercapai 109,91%, Deposito tercapai sebesar 99,60%, Laba bersih tercapai 88,54% dan Aset tercapai 90.65%



Tercapainya Laba Bersih sebesar 88,54% hal ini perlu lebih efisiensi lagi dalam biaya operasional, sehingga di harapkan terdapat peningkatan laba, Aset tercapai 90,65% terhadap RBB, namun di bandingkan realisasi bulan Desember 2019 Aset turun 5,57% atau Rp.678.651 ribu di karenakan selain turunnya KYD juga karena turunnya simpanan dari bank lain

d. Pemenuhan Modal Inti

Jumlah Modal Inti pada triwulan ke II adalah sebesar Rp.6.282.021 ribu atau terdapat kenaikan sebesar Rp 70.552 ribu di karenakan adanya peningkatan pada laba tahun berjalan

e. Selama Triwulan II terdapat 4 transaksi di atas Rp 500 juta dan telah dilaporkan ke PPATK dan bukan merupakan LTKM

f. Saran untuk Manajemen

- Bank telah melakukan restrukturisasi kredit khusus kepada nasabah yang terdampak Covid-19 dengan memberikan penurunan suku bunga maupun penurunan jumlah angsuran , diharapkan akan memperkecil risiko kredit bermasalah sehingga NPL akan terjaga di bawah 5%
- Disarankan untuk melakukan revisi RBB akibat adanya pandemi Covid-19
- Senantiasa menjaga ratio- ratio keuangan agar tingkat kesehatan bank selalu sehat, sehingga BPR dapat berkembang secara prudent dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan

Tri Wulan III

a. Tingkat Kesehatan Bank pada posisi Triwulan III adalah sehat dengan rincian sebagai berikut:

- CAR 124,92% meningkat 4,57% karena meningkatnya jumlah Modal dan menurunnya jumlah ATMR sebesar Rp 143.090
- LDR 80,94% turun 4,92% di karenakan menurunnya jumlah kredit yang di berikan, dan terdapat penurunan sumber dana yg tidak seimbang dengan turunnya kredit
- ROA 4,78% turun 0,05% di karenakan rata rata laba sebelum pajak turun
- BOPO 80,05% turun 0.03% di karenakan turunnya Kredit Yang Diberikan berakibat pada turunnya pendapatan bank
- Cash Ratio 47,15% naik 16,6% dikarenakan turunnya Kredit Yang Diberikan berakibat pada meningkatnya sumber Dana,



-
- PPAPWD tidak ada perubahan karena sudah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Perkembangan Kredit
 - Pada Triwulan III kredit masih mengalami penurunan sebesar Rp 550.520 ribu dari Rp 9.728.411 menjadi Rp 9.177.891 ribu
 - Jumlah kredit Non Performing pada triwulan III sebesar Rp. 412.506 ribu atau turun di bandingkan triwulan II sebesar Rp 649.000 ribu dikarenakan menurunnya kredit dengan kualitas Kurang Lancar
 - Yang perlu mendapat perhatian manajemen agar memperhatikan kredit yang memiliki tunggakan dalam perhatian khusus dan tunggakan lebih dari 3 bulan agar tetap dilakukan pembinaan dan penagihan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
 - c. Perbandingan Rencana Bisnis Bank dengan Realisasi

Realisasi pada semester III terhadap RBB KYD tercapai 110,05%, Tabungan 124,29%, Deposito 100,70%, Laba 131,47% dan Aset 103,57%. Untuk pencapaian realisasi hampir semua pos di atas 100% namun bila di bandingkan dengan posisi Desember 2019 Aset mengalami penurunan sebesar Rp.613.260 ribu atau 5,03%
 - d. Pemenuhan Modal Inti

Pada Triwulan III modal inti Bank sebesar Rp 6.346.036 ribu atau naik sebesar Rp.64.015 ribu di karenakan adanya peningkatan laba tahun berjalan pada triwulan III
 - e. Pada triwulan III terdapat 1 transaksi di atas Rp 500 juta dan telah dilaporkan ke PPATK, dan bukan merupakan transaksi yang mencurigakan
 - f. Saran untuk manajemen
 - Rencana untuk rekrutmen tenaga kerja, agar memilih tenaga kerja yang kompeten sesuai dan bertanggung jawab pada bidangnya
 - Lembaga bank harus dapat menerapkan disiplin tinggi bagi setiap satuan tugas dengan sistem reward and punishment yang jelas dan transparan.
 - Senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan, agar TKS tetap sehat, dan BPR diharapkan dapat berkembang

Triwulan IV

- a. Tingkat kesehatan bank pada posisi Triwulan IV adalah sehat dengan rincian sebagai berikut:
 - CAR 132,89% meningkat 7,97% karena menurunnya ATMR di karenakan menurunnya KYD tidak sebanding dengan meningkatnya modal



-
- LDR 78,93% turun 2,05% dikarenakan turunnya kredit yang di berikan
 - ROA 5,39% turun 0,61% di karenakan rata rata laba sebelum pajak turun
 - BOPO 77,83% turun 2,22% dikarenakan turunnya Kredit Yang Diberikan yang berakibat pada turunnya pendapatan operasional bank.
 - Cash Ratio 52,70% naik 5,55% yang dikarenakan turunnya Kredit Yang Diberikan yang berakibat pada meningkatnya sumber dana
 - PPAWD tidak ada perubahan karena sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- b. Perkembangan Kredit
- Pada triwulan IV Kredit Yang Diberikan masih mengalami penurunan sebesar Rp.551.687 ribu dari Rp.9.177.891 ribu menjadi Rp.8.662.204 ribu
 - Jumlah Kredit Non Lancar pada triwulan IV sebesar Rp.359.537 ribu atau turun dibandingkan dengan triwulan III sebesar Rp.412.506 ribu
- c. Perbandingan Rencana Bisnis dengan Realisasi
- Realisasi kredit yang diberikan pada triwulan IV terhadap rencana bisnis tercapai 113,31%, Tabungan 134,34%, Deposito 104,38%, Laba 209,74% dan Aset 107,99%.
- d. Pemenuhan Modal Inti
- Pada triwulan IV modal inti bank sebesar Rp.6.456.704 ribu atau naik sebesar Rp.110.668 ribu dikarenakan adanya peningkatan laba tahun berjalan.
- e. Pada triwulan IV terdapat 4 transaksi di atas 500 juta dan telah dilaporkan ke PPATK, dan bukan merupakan transaksi yang mencurigakan.
- f. Saran untuk manajemen
- Dalam penyusunan proyeksi rencana bisnis bank periode 2021, sebaiknya mengacu dan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pada waktu normal dan tingkat pertumbuhan pada waktu pandemi covid-19 sehingga proyeksi pertumbuhan RBB diharapkan tercapai sesuai dengan yg ditargetkan.
 - Bank harus selalu menerapkan prinsip ke hati-hatian terlebih pada debitur yang terdampak langsung covid-19 dan terus melakukan pembinaan terhadap debitur dan menjaga NPL dibawah 5%.
 - Senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan, agar tingkat kesehatan bank tetap dalam kategori sehat dan BPR diharapkan terus berkembang.



IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2020 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Ngunut Arta, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.



XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Ngunut Arta memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di PT. BPR Ngunut Arta dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan



6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain :

1. Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan
2. Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit
4. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2020, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
5. Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
6. Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Kantor Kas dan seluruh bagian.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
8. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.



INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 135,77% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%.
2. Rasio NPL adalah 3.80%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)
3. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
4. Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen



Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:

1. Melaksanakan audit terhadap kantor pusat dan kantor kas dan seluruh bagian.
2. Melaksanakan audit terhadap proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
3. Memperbaharui rencana strategis audit dengan berpedoman pada rencana bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
4. Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kredit yang baik.
5. Melaksanakan audit operasional agar berjalan sesuai dengan prosedur untuk mengurangi risiko pelayanan dan pelaporan.

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

1. Sesuai Keputusan RUPS PT. BPR Ngunut Arta penunjukan Kantor AKuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT.BPR untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yg berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Thufan dan Rosyid untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
4. Laporan Keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah diaudit oleh Akuntan Publi yang independen, kompeten, professional dan obyektif serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama.

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Ngunut Arta dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah :



TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2018	MADE SUDARMA THOMAS DAN DEWI	PAU- 856/MTD/MLG/XII/2 018	2-1-2018 s.d. 9-3-2019	Terdaftar di OJK
2019	THOUFAN DAN ROSYID	103.00/GA- NA.19/TNR-TP/X/19	16-12-2019 s.d. 14-3-2020	Terdaftar di OJK
2020	THOUFAN DAN ROSYID	179.00/GA- NA.20/ TNR- TP/XI/2020	4-1-2021 s.d. 4-4-2021	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab APU PPT :

1. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan peraturan lainnya yang terkait dengan penerapan APU PPT telah dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan frontliners.
2. Pejabat Eksekutif APU PPT menjalankan tugas pemeriksaan dokumen/checklist dengan baik dan menyeluruh.
3. Memberikan pertimbangan secara obyektif atas penerimaan dan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon nasabah/WIC yang tergolong beresiko tinggi.
4. Memastikan profil nasabah tersimpan dengan lengkap dan akurat serta dapat digunakan sewaktu-waktu untuk proses verifikasi.
5. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap penemuan transaksi keuangan yang mencurigakan.
6. Memberikan usulan perbaikan terhadap system APU PPT kepada Direksi.
7. Memantau dan memelihara Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diberikan oleh OJK atau melalui informasi yang tersedia di media social.
8. Memeriksa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direksi.
9. Memastikan segala bentuk pelaporan ke instansi terkait, seperti OJK, BI dan PPATK berjalan tepat waktu dan lengkap.
10. Memantau perubahan dan perkembangan peraturan di ranah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
11. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI/OJK/lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan yang terkait bagiannya.



4 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Ngunut Arta mencakup:

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Risk Appetite bulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko semester II tahun 2020 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.



Data penyediaan dana di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	4	50.139
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	208	8.299.423
Jumlah		282	8.349.562

Keterangan:

Sepanjang tahun 2020 PT. BPR NGUNUT ARTA tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Pihak Terkait.

XIV RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, prinsip-prinsip kehati-hatian dan asas perbakan yang sehat serta konsistensi dengan visi dan misi PT. BPR NGUNUT ARTA. Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Ngunut Arta senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Ngunut Arta menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR NGUNUT ARTA TAHUN 2021

1. Pada tahun 2020 Kredit Yang Diberikan terealisasi 112,56% terhadap rencana bisnis Bank.
2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
3. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR



XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Tahunan meliputi profil perusahaan seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan keuangan yang meliputi neraca, rugi laba dan catatan keuangan lainnya.

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi triwulanan disampaikan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan menyajikan perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan tahun sebelumnya.

PT. BPR NGUNUT ARTA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR NGUNUT ARTA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.



2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

1. PT. BPR Ngunut Arta telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Ngunut Arta secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Ngunut Arta pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website dan media sosial seperti instalgram, whatsApp atau facebook.
2. Selain itu, PT. BPR Ngunut Arta menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Ngunut Arta aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dilakukan secara bersama-sama dengan bpr di tulungagung melaui perbarindo. Pada tahun 2020 PT. BPR NGUNUT ARTA tidak melakukan kegiatan sosial, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19.

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
NIHIL				



XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,89	Baik	PT. BPR Ngunut Arta telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Ngunut Arta
ANALISIS		
<p>Hasil self asesment penerapan Tata Kelola tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT. BPR NGUNUT ARTA mencapai nilai 1,89 dengan peringkat komposit "BAIK". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap3. Sumber Daya Manusia khususnya account officer masih kurang pada akhir tahun 2020.		



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR "NGUNUT ARTA" ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR NGUNUT ARTA. Melalui laporan tata kelola ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar manajemen yang di dasarkan pad etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR NGUNUT ARTA tahun 2020.

Tulungagung, 28 April 2021

Pengurus PT. BPR Ngunut Arta

HADY BANDONO NITIUTOMO

Komisaris Utama

ANING SUNINGKAT

Direktur Utama